

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Timur dan terletak di ujung Barat Samudra Pasifik. Negara ini sangat rentan terhadap bencana alam karena iklim dan topografinya, dan telah mengalami banyak gempa bumi, topan, dan jenis bencana lainnya. Jepang terletak di zona sirkum-Pasifik, di mana hampir semua gunung berapi di dunia terkonsentrasi, dan memiliki 83 gunung berapi aktif-sepersepuluh dari total dunia. Letak Jepang juga berada di zona subduksi dan zona Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*). Cincin Api Pasifik adalah gugusan gunung berapi yang berada di Samudra Pasifik. Bentangannya ialah tempat pertemuan lempeng Amerika Utara, Pasifik, Eurasia, dan Filipina. Tiap tahunnya setidaknya terjadi 10.000 kali guncangan, dan 2000 diantaranya adalah guncangan yang dapat dirasakan oleh manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Jepang telah melakukan investasi yang signifikan untuk mengurangi risiko daripada menghabiskan lebih banyak dalam kegiatan tanggap darurat setelah bencana, contoh yang baik dari investasi 51 persen dalam “mitigasi dan kesiapsiagaan” dari total anggaran proyek terkait bencana dilakukan selama 1990-2010 (Meguro, 2015). Atas pengalamannya dalam menghadapi berbagai jenis musibah gempa bumi, Jepang telah berhasil sebagai negara yang memiliki sistem manajemen bencana yang baik melalui program yang menggabungkan perkembangan teknologi dan keterlibatan publik yang signifikan.

Sebagai ‘Center of Excellent’ dalam penanggulangan dan mitigasi bencana, Jepang memanfaatkan pengetahuan dan teknologinya secara luas untuk mempromosikannya kepada dunia internasional dalam kerja sama pengurangan risiko bencana. Kemampuan dan pengalaman Jepang dalam melakukan penanggulangan bencana termasuk membangun mitigasi bencana dengan menekan potensi korban jiwa dan

kerugian akibat bencana telah digunakan Jepang untuk memainkan peranan global.

Kemampuan Jepang dalam mengatasi bencana ini kemudian dibagikan ke negara-negara yang rentan terhadap bencana, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang rentan akan terjadinya bencana alam. Secara geografis Indonesia terletak antara dua samudera besar dan terletak di wilayah lempeng tektonik atau juga berada pada wilayah lingkaran cincin api (*ring of fire*), yang berarti bahwa Indonesia rawan terkena bencana alam seperti Gempa Bumi dan mudah menimbulkan Tsunami. Selain itu, secara hidroklimatologis Indonesia juga terdampak dengan adanya fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscillation) dan La Nina sehingga berimbas pada terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. (Sudibyakto, Manajemen Bencana di Indonesia , 2011)

Bencana tsunami yang terjadi Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2004 telah menorehkan luka yang sangat mendalam untuk masyarakat Indonesia. Dikarenakan gempa yang sangat kuat ini diikuti oleh gelombang pasang besar sehingga menimbulkan beberapa permasalahan antara lainnya yaitu jumlah korban meninggal dan luka yang sangat besar, berdampak pada sosial ekonomi yang luar biasa, kerusakan bangunan pada wilayah tersebut, serta kegiatan Pendidikan yang terhambat karena fasilitas banyak yang rusak atau kondisi yang kurang memadai. Gempa magnitudo 9,0 yang berpusat di 160 km di sebelah utara Pulau Simeulue pada kedalaman 30 km ini, menyebabkan tsunami di 14 negara dengan tinggi gelombang mencapai 30 meter . Gempa juga mengguncang Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Maladewa. Tsunami 2004 ini juga menerjang beberapa wilayah lain yang berada di sebelah timur Aceh seperti Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe. Gempa dan Tsunami Aceh ini menelan korban jiwa 280 ribu lebih. Korban jiwa di Indonesia 220 ribu. Korban besar lainnya jatuh di Sri Lanka (35 ribu), India (18 ribu) dan Thailand (8 ribu) (Fahmi, 2019). Kawasan pantai timur Aceh menerima dampak tsunami yang lebih kecil

dibandingkan dengan kawasan di Banda Aceh dan Pantai Barat-Selatan Aceh.

Bantuan Jepang kepada Indonesia dalam penanganan bencana gempa dan tsunami Nanggroe Aceh Darussalam ini meliputi finansial, teknis dan tenaga kemanusiaan yang semuanya adalah orang asing, terutama bantuan personal yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah. Keterlibatan Jepang dalam upaya penanggulangan bencana di negara lain termasuk Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa Jepang merupakan negara yang seringkali tertimpa bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Karena wilayah Jepang terletak pada pertemuan 3 lempeng benua yaitu Eurasia, Pasifik dan Laut Filipina Asia, dan berada pada area *Circum Pasific mobile zone*, aktivitas vulkanik dan seismik berlangsung secara konstan. Hal ini menyebabkan adanya aktivitas gempa bumi secara periodik dan terus menerus yang melanda Jepang. (Sekimov, 2012)

Akibat letak geografis yang rawan terjadinya bencana itulah Pemerintah Jepang memberikan perhatian yang serius dan memprioritaskan pengelolaan upaya penanggulangan dengan membentuk Dewan Pusat Penanggulangan Bencana (Central Disaster Management Council) yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri bersama dengan Menteri negara untuk Pengelolaan Penanggulangan Bencana (*Minister of State for Disaster Management*).

Jepang terkenal sebagai negara yang sangat sigap menghadapi bencana karena memiliki system penanggulangan bencana (*Disaster Management*) terbaik di dunia, ini dapat dilihat dari kesiapan pemerintah dalam menangani bencana yang muncul baik skala kecil dan besar. Jepang juga merupakan negara yang berhasil membangun pertahanan dalam mengantisipasi bencana yang terjadi di negaranya, seperti membuat bangunan rumah yang memiliki ketahanan anti Gempa Bumi untuk meredam resiko yang terjadi jika datang gempa yang cukup besar.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang telah berlangsung selama 60 tahun yang didasarkan pada

perjanjian perdamaian antar kedua negara sejak Januari 1958. Sejak itulah hubungan bilateral Jepang dan Indonesia berlangsung baik. Penjajahan oleh Jepang dimasa lampau telah membuat Jepang harus memberikan dan menyediakan bantuan luar negeri dalam bentuk perbaikan rugi pampasan perang ke Indonesia sebesar 223.080.000 dolar AS yang diangsur dalam waktu 20 tahun. Situasi ini tentunya mendorong Jepang untuk terus menumbuhkan citra baik negaranya dimata Indonesia, salah satunya dengan turut aktif memberikan bantuan seperti dalam situasi bencana dan kesepakatan kerjasama. Kerjasama antar kedua negara diberbagai sektor terus dilakukan diantaranya kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, lingkungan hidup, pariwisata, pendidikan, serta bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman dana. Indonesia juga sebagai negara merdeka yang kaya akan sumber daya alam jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, dan sebagai negara yang mempunyai potensi pasar ekspor Jepang, menjadikan Indonesia tujuan utama pemberian bantuan ODA (*Official Development Assistance*) dimana Jepang menganggap bahwa pemberian bantuan ODA kepada Indonesia akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi Pemerintah Jepang untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Bantuan ODA Jepang di Indonesia ini dalam berbagai sektor seperti energi, transportasi, pertanian dan perkebunan, kesehatan dan kebersihan, informasi dan komunikasi, dan penanggulangan bencana (Indonesia K. B., Pengenaln Bantuan ODA Jepang di Indonesia menurut Bidang, 2012).

Jepang turut membantu menyalurkan kemampuan ataupun teknologi untuk mitigasi bencana pasca tsunami Aceh di Indonesia dengan mengusulkan inisiatif untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pembentukan negara yang memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasi bencana alam. Dengan pengalaman, sistem dan teknologi yang dimiliki oleh Jepang dalam penanggulangan bencana khususnya mitigasi, Jepang tentunya akan menjadi negara yang dapat membantu Indonesia.

Terlihat dari bagaimana Jepang secara apiknya menunjukkan kepada dunia bahwa bencana alam jika dikelola dengan baik akan menciptakan citra positif dari suatu negara, sehingga akan membuka peluang kerjasama yang seluas-luasnya dengan negara-negara lain. *Soft diplomacy* semacam inilah yang biasa disebut dengan diplomasi bencana. Termasuk dalam relasinya dengan Indonesia. Bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan serta kerugian yang sangat besar, dimana faktor penyebabnya ialah kemampuan dalam penanganan bencana atau mitigasi bencana, rendahnya pengetahuan dalam menghadapi bencana dan kurangnya kesadaran tentang bagaimana harus hidup di wilayah yang rentan akan bencana. Situasi ini membuka peluang baru dalam hal kerjasama bagi Jepang untuk turut berkontribusi membangun kemampuan Indonesia dalam hal mitigasi bencana. Kerjasama dengan negara lain yang memiliki kapasitas serta teknologi yang mumpuni dan lebih maju dalam mitigasi bencana sekiranya perlu dilakukan baik dalam teknologi maupun meningkatkan kemampuan membangun mitigasi yang baik.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana Jepang berkontribusi dalam membangun mitigasi bencana pasca Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam pada Tahun 2004.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kontribusi Jepang dalam bantuan mitigasi bencana pasca Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam pada Tahun 2004?

## **1.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana kontribusi Jepang dalam bantuan mitigasi bencana pasca Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam pada Tahun 2004, maka digunakan konsep yang dianggap relevan dalam analisis penulisan ini. Konsep yang akan digunakan yaitu, Konsep Diplomasi Bencana dan Konsep Manajemen Bencana.

### **1.3.1. Diplomasi Bencana**

Menurut Ilan Kelman (2012), diplomasi bencana alam menjadi pembahasan tentang mengapa dan bagaimana aktivitas yang terlibat dengan bencana alam mengurangi atau tidak mengurangi konflik dan menimbulkan kooperasi baik itu sebelum bencana terjadi maupun setelah bencana. Diplomasi bencana memiliki arti yang berbeda jika dibahas dalam konteks sebelum bencana dan sesudah bencana. Sebelum bencana terjadi, diplomasi ini berbicara tentang bagaimana pencegahan, upaya, mitigasi untuk mengurangi jatuhnya korban diikuti dengan upaya untuk membantu ataupun melakukan kerjasama dengan negara yang tertimpa musibah, sementara setelah bencana terjadi, diplomasi ini akan berbicara tentang bagaimana konflik dan perdamaian dipengaruhi oleh bencana alam (Ratih Herningtyas, 2015).

Menurut Weizhun, praktik diplomasi bencana memiliki pengaruh besar dan nilai-nilai aktual pada peningkatan kepentingan nasional dan internasional. Diplomasi bencana merupakan konsep yang lebih menekankan kerja sama pada saat suatu bencana terjadi dan diharapkan mampu menstimulasi hubungan kerja sama lainnya pasca bencana alam tersebut (Weizhun). Bencana semakin menjadi permasalahan penting untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, yang sangat menarik empati orang dan mendorong masyarakat internasional untuk berpartisipasi dalam mitigasi bencana. Fenomena ini tidak hanya dalam urusan internasional dan hubungan internasional saja, melainkan juga melibatkan negara merdeka dan negara-negara pada level yang berbeda (Comfort, 2000). Terdapat tiga tingkatan dampak dari diplomasi bencana yaitu jangka pendek, jangka panjang, dan efek sebaliknya. Hasil dari jangka pendek dari diplomasi menghasilkan penyelesaian atau jalan baru bagi pihak yang berkonflik atau terkena bencana, sementara hasil dari jangka panjang akan menghasilkan prasangka yang baik yang kemudian memudahkan proses diplomasi dilakukan, sehingga dapat menstimulasi kerjasama dibidang luar kebencanaan.

Konsep diplomasi bencana melihat ke arah yang terkait dengan bencana baik itu mitigasi, pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan membawa pengaruh dalam hubungan interaksi antar negara terlibat. Dengan kata lain bencana dijadikan salah satu elemen yang dapat diangkat menjadi isu yang diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Diplomasi bencana dapat membuat serta mengembangkan Kerjasama internasional, juga baik secara multilateral dan bilateral. Bukan hanya itu diplomasi bencana adalah bentuk kerjasama yang efektif apabila mampu dijadikan sebagai salah satu wadah ataupun salah satu fokus dalam hubungan diplomatik (Kelman, 2012), sehingga merupakan bagian dari *soft diplomacy* yang menopang kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam lingkup luas dan dengan tujuan yang hendak dicapai masing-masing aktornya. Fungsionalitas diplomasi bencana dalam ruang peningkatan kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya secara luas juga dapat dilihat ketika negara-negara yang tergolong rawan akan bencana baik yang sebelumnya telah melakukan kerjasama yang intensif maupun tidak, memilih untuk melakukan kerjasama dalam mengurangi resiko atau mitigasi bencana dan dampak bencana yang mana tentunya hal ini guna memperkuat kemitraan global.

Terdapat tiga jalur diplomasi bencana menurut Ilan Kelman yakni *government-led*, *organization-led*, dan *people-led* yang kemudian disederhanakan oleh Davidson dan Montville menjadi dua jalur diplomasi bencana yaitu jalur formal dan jalur non formal. Jalur formal adalah jalur yang termasuk dalam interaksi antara politisi, diplomat, dan pemerintahan yang berujung pada sebuah bentuk kerjasama, perjanjian, atau nota kesepahaman. Sementara jalur non-formal adalah jalur yang dilakukan dalam interaksi ilmiah, pertukaran budaya, dan kunjungan individu non-politik. Diplomasi bencana yang melalui jalur formal dilakukan sebagai sarana untuk melakukan diplomasi bencana secara resmi dimana adanya interaksi yang dipimpin oleh pemerintahan

suatu negara secara langsung guna mencapai kepentingan negaranya.

Diplomasi bencana yang dilakukan oleh Jepang ke Indonesia adalah menggunakan jalur formal. Jepang awalnya memberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanggulangan bencana, namun lambat laun kedua negara akhirnya sepakat untuk melakukan hubungan kerjasama dalam hal mitigasi bencana. Jepang sebagai negara merdeka yang mempunyai level berbeda dalam kemampuan dan teknologi namun memiliki resiko bencana alam yang sama menggunakan diplomasi bencana ke Indonesia dengan membantu dan mengusulkan inisiatif untuk bekerjasama dalamantisipasi bencana alam sebagai bagian dari upaya soft diplomacy dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia. Kerjasama yang dilakukan ini tentunya tak terlepas dari kontribusi Jepang di Indonesia pada tsunami Aceh tahun 2004 yang membuat Indonesia percaya bahwa Jepang adalah negara panutan yang memiliki sistem manajemen bencana yang baik, sehingga akhirnya Indonesia menginginkan kerjasama dengan Jepang. Kerjasama kedua negara ini kemudian disahkan melalui Nota Kesepahaman *atau Memorandum of Understanding* (MoU) di tahun 2007, dan hingga kini kerjasama kedua belah pihak terus diperbaharui. Maka dari itu kerjasama ini termasuk dalam jalur formal karena kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama resmi yang disahkan oleh pemerintah masing-masing negara melalui MoU. Sebagai negara yang telah berpengalaman diberbagai hal dalam bidang bencana alam atau kebencanaan, Jepang mempunyai banyak aspek yang ditawarkan dalam hal keilmuan dan keahlian hingga teknologi untuk melakukan kerjasama mitigasi bencana baik melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di masa mendatang sebagai salah satu bentuk diplomasi bencana. Bencana menjadi sarana Jepang untuk mencapai kepentingan strategisnya di Indonesia. Jepang menilai bahwa tidak ada ruginya dalam membantu dan menyepakati kerjasama dengan Indonesia dalam mitigasi bencana, sebab Indonesia sendiri



merupakan mitra penting Jepang di Kawasan ASEAN dan sebagai focus penyaluran ODA Jepang. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara terbesar (bahkan pernah menjadi negara yang terbesar dalam kurun waktu tertentu) penerima ODA Jepang. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat vital bagi kepentingan geo-ekonomi maupun kepentingan geopolitik Jepang. Kerjasama antar kedua negara dalam sektor lainnya seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dll. bahkan telah dilakukan. Indonesia mempunyai potensi pasar ekspor Jepang. Dengan memberikan bantuan dan menyepakati kerjasama dengan Indonesia akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemerintah Jepang untuk meningkatkan perekonomian negaranya, juga memperoleh pengetahuan baru yang dapat secara signifikan meningkatkan geo-sains & teknologi mitigasi bencana Jepang.

### **1.3.2. Manajemen Bencana**

Manajemen Bencana atau *Disaster Management* dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan yang berkaitan dengan bencana, dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Jika berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2007 manajemen bencana diartikan sebagai proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Tujuan secara umum dari manajemen kebencanaan antara lain untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana, melindungi nyawa masyarakat beserta aset-aset produktif hingga infrastruktur umum yang dimiliki wilayah agar terhindar dari ancaman bencana. Selain itu menghitung kerusakan, menganalisis penampakan bencana, dan penanganan korban juga merupakan bagian dari manajemen bencana.

Siklus manajemen bencana terdiri dari tiga fase yakni fase prabencana, fase saat terjadi bencana dan fase bencana atau tahapan-tahapan yang meliputi; proses pencegahan dan

mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi. Fase prabencana merupakan pengurangan risiko bencana dengan tujuan mengurangi timbulnya suatu ancaman, mengurangi dampak buruk akan suatu bencana yang mana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa modifikasi dan perbaikan lingkungan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahapan dalam pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural dan non-struktural (kultural) dimana secara struktural upaya yang dilakukan ialah dalam hal mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan transfer teknologi untuk membangun bangunan tahan bencana, sementara secara non-struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah dengan mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga, terbangun masyarakat yang tangguh dan paham akan situasi bencana. Sasaran dan Inti dari mitigasi non-struktural (kultural) ini adalah kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana (Febriarlita, 2018).

Siklus manajemen bencana bukanlah suatu siklus yang terpotong antara tiap tahapan bencana. Pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana berkolaborasi bersama dengan proporsi berbeda dalam setiap penanganan bencana. Terdapat lima model manajemen bencana yaitu (Sang Gde Purnama, 2017):

- a. *Disaster management continuum model*. Model ini mungkin merupakan model yang paling populer karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas sehingga lebih mudah diimplementasikan. Tahap-tahap manajemen bencana di dalam model ini meliputi *emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning*.
- b. *Pre-during-post disaster model*. Model manajemen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu

dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan *disaster management continuum model*.

- c. *Contract-expand model*. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada manajemen bencana (*emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning*) semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana tahap tertentu lebih dikembangkan (*emergency dan relief*) sementara tahap yang lain seperti *rehabilitation, reconstruction, dan mitigation* kurang ditekankan.
- d. *The crunch and release model*. Manajemen bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan maka bencana akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski *hazard* tetap terjadi.
- e. *Disaster risk reduction framework*. Model ini menekankan upaya manajemen bencana pada identifikasi risiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun *hazard* dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut.

Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka UU No. 24 tahun 2007 menyatakan “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Rumusan penanggulangan bencana dari UU tersebut mengandung dua pengertian dasar yaitu (Sang Gde Purnama, 2017):

- a. Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus.

- b. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Melalui konsep Manajemen Bencana ini yang mana mitigasi bencana termasuk didalamnya, penulis ingin menganalisa kontribusi Jepang dalam membangun dan memberikan bantuan dalam hal manajemen bencana di Indonesia sebagai satu dari perwujudan komitmen Jepang pada pentingnya melaksanakan dan menindaklanjuti hasil konferensi dunia PBB mengenai pengurangan bencana dengan secara aktif berkontribusi pada promosi dan kerjasama internasional dalam upaya pengurangan bencana dan manajemen bencana 2015-2030 (Japan M. o., 2018). Melalui ODA juga, Jepang meluncurkan inisiatif pengurangan bencana dengan mempromosikan kerjasama pengurangan bencana untuk mendukung upaya swadaya dan pengembangan sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Lalu untuk melakukan penguatan kerjasama Regional dalam pengurangan bencana melalui *Asian Disaster Reduction Center (ADRC)*. Mitigasi resiko bencana memerlukan kerjasama yang erat di Kawasan dengan kondisi iklim, topografi, dan geografis yang serupa. Untuk memperkuat hubungan antara negara-negara Asia, salah satu wilayah yang paling rawan bencana di dunia, termasuknya Indonesia, Jepang sebagai mitra sesama Asia akan bekerja untuk mempromosikan kerjasama dalam upaya pengurangan bencana melalui ADRC di Kobe, dan akan menyebarluaskan temuannya ke seluruh dunia. Hal ini agar dapat di implementasikan secara langsung kepada negara-negara yang telah sepakat untuk menerima bantuan dan kerjasama Jepang dalam hal mitigasi bencana.

Jepang telah berinvestasi sejak lama pasca kekalahan perang dunia II dimana mulai saat itu pemerintah sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk mitigasi bencana. Hasilnya dapat dilihat pada bagaimana sistem peringatan dini Jepang dapat menyelamatkan nyawa dengan angka korban jiwa yang berkurang secara signifikan pada saat tsunami yang

menghantam kawasan Higashimatsushima pada 2011 lalu. Padahal potensi korban jiwa saat itu diperkirakan berkisar di angka 200 ribu , namun dapat ditekan menjadi 20 ribu jiwa. Pemerintah Indonesia telah melakukan mitigasi tetapi masih belum efektif dan masih belum menjadi agenda rutin pemerintah di daerah yang memiliki potensi tingkat tinggi bencana. Dengan kata lain, mitigasi bencana di Indonesia masih belum efektif dalam manajemen dan pelaksanaannya. Hal ini juga terlihat dari banyaknya korban bencana seperti gempa bumi Bantul tahun 2006 dengan skala 6,3 richer yang menelan korban 5.749 orang dan disisi lain, gempa Jepang tahun 2009 dengan skala yang sama namun tidak ada korban jiwa sama sekali. Kedua bencana tersebut memiliki skala kekuatan gempa yang sama tetapi jumlah korban yang berjatuh sangat jauh berbeda. Banyak hal yang harus direformasi di Indonesia mengenai mitigasi bencana dan pengelolaannya. Keberhasilan manajemen bencana oleh Jepang telah diketahui banyak negara lain dan menjadikan Jepang sebagai 'role model' dalam hal manajemen bencana. Jepang mengelola dan mengatur banyak daerah, sebelum dan sesudah bencana. Mitigasi bencana Jepang dilakukan secara struktural dan non-struktural, dapat dijadikan contoh dalam penanganan bencana di Indonesia.

#### **1.4 Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah, penulis hendak menjawab melalui pelaksanaan kajian dengan menggunakan landasan teori, sehingga menemukan hipotesa bahwa, kontribusi Jepang dalam bantuan mitigasi bencana pasca Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam pada Tahun 2004 adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Membangun sistem manajemen bencana yang baik di Indonesia sebagai satu perwujudan komitmen Jepang untuk secara aktif berkontribusi pada promosi kerjasama internasional dalam upaya pengurangan bencana.

2. Pengurangan Kerugian Besar Akibat Bencana Melalui Pemberian bantuan ODA (*Official Development Assistance*)
3. Pemberian Edukasi Dalam Penanganan Bencana Sebagai Usaha Membentuk Pola Pikir Masyarakat yang Tanggap Bencana

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian yang berjudul “Kontribusi Jepang dalam Bantuan Mitigasi Bencana Pasca Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam pada Tahun 2004”, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui kontribusi apa saja yang dilakukan oleh Jepang serta membangun kemampuan mitigasi bencana di Nanggroe Aceh Darussalam pasca Tsunami pada tahun 2004. Cara kerja Jepang dalam mitigasi bencana lebih unggul daripada Indonesia, maka dari itu Jepang dapat dijadikan model bagi Indonesia dalam menjalin Hubungan Internasional melalui upaya mitigasi bencana yang efektif, efisien dan bermanfaat langsung.

### **1.6 Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Adapun fokus penelitian yaitu dalam rentang waktu tahun 2004-2018. Yang dimulai sejak tahun 2004 terjadinya bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam hingga tahun 2018 yang dimana disepakati lebih lanjut kerjasama Jepang-Indonesia dalam hal mitigasi bencana. Namun penelitian ini terfokus pada upaya Jepang untuk berkontribusi dalam membangun mitigasi bencana di Indonesia pasca Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam.

### **1.7 Metode Penelitian**

Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan oleh penulis untuk menggambarkan kejadian atau fakta mengenai Kerjasama mitigasi bencana Indonesia – Jepang

dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan peran Jepang terhadap Indonesia dalam mitigasi bencana pasca Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2004. Maka dari itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan *website*.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi empat bab sebagai berikut:

**BAB I**, Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, Bab ini berisi pembahasan mengenai indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana dengan bencana terbesar yang dialami Indonesia ialah gempa dan tsunami Aceh di tahun 2004, pembahasan mengenai sistem manajemen bencana yang dimiliki Jepang yang dibandingkan dengan sistem manajemen bencana Indonesia, penjelasan hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia sebelum bencana aceh.

**BAB III**, penulis menjelaskan upaya Jepang untuk berkontribusi dalam bantuan mitigasi bencana pasca gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 dengan melakukan kerjasama mitigasi bencana sebagai bentuk diplomasi bencana Jepang ke Indonesia, dan membantu membangun sistem manajemen bencana Indonesia sebagai satu perwujudan dari komitmen Jepang untuk secara aktif berkontribusi pada promosi kerjasama internasional dalam upaya pengurangan bencana.

**BAB IV**, Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis data dan pembahasan dari penelitian ini.